

ABSTRAK

MHD. IKHSAN BATUBARA

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, dan kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pengadaan finger print, Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pengadaan yang bukan berdasarkan permintaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5114 K/Pid.Sus/2023

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan Tindakan tersebut diatur dalam bentuk swakelola (pengadaan dilakukan sendiri oleh pemerintah) atau dalam bentuk pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dalam bentuk pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan berbagai metode untuk menentukan penyedia, salah satunya dengan metode penunjukan langsung. Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pengadaan finger print Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, orang yang memegang tanggungjawab dapat diminta pertanggungjawaban pidana, apabila dia melakukan perbuatan Merugikan Keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara, Pertimbangan hakim atas tindakan pengadaan yang bukan berdasarkan permintaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5114 K/Pid.Sus/2023, Berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana namun Terdakwa tersebut tidak terbukti melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korupsi, Figer Print.

ABSTRACT

MHD. IKHSAN BATUBARA

Corruption in Indonesia has become widespread in society. Its development continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that occur, the amount of state financial losses, and the quality of criminal acts that are increasingly systematic, and the scope that enters all aspects of people's lives.

The problem is how are the legal regulations regarding the procurement of goods/services within the scope of government based on laws and regulations, What is the form of accountability for criminal acts of corruption in fingerprint procurement, How are judges' considerations for procurement actions that are not based on requests in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5114 K/Pid.Sus/2023

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed legally.

The legal provisions on procurement of goods/services within the scope of government based on laws and regulations. The action is regulated in the form of self-management (procurement is carried out by the government itself) or in the form of selecting providers of goods/services. Procurement of goods/services in the form of selecting providers of goods/services is carried out using various methods to determine the provider, one of which is by direct appointment method. Form of responsibility for criminal acts of corruption in procurement of fingerprints Criminal responsibility is the responsibility of a person for the criminal acts he has committed. Form of Criminal Responsibility in Corruption Crimes, the person holding the responsibility can be held criminally responsible, if he commits an act that is detrimental to State Finances and/or the State Economy, Judge's consideration of procurement actions that are not based on requests in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5114 K/Pid.Sus/2023, Based on the considerations above, the Defendant's actions have fulfilled the elements of a crime in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Eradication Law, as charged in the First Primary Indictment, therefore the Defendant has been proven guilty and sentenced to a criminal penalty, but the Defendant has not been proven to have violated the Second Indictment of the Public Prosecutor

Keywords: Accountability, Corruption, Figer Print.